

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori-teori yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan ungkapan dari para ahli terkait yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang terkait yaitu Kemiskinan, Pendapatan Per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Bantuan Sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

2.1.1 Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Dapat dikategorikan penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan atau GA merupakan batasan minimum pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulannya, baik memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan (Badan Pusat Statistik, 2023).

Garis Kemiskinan atau GA menurut BPS, adalah batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan (Badan Pusat Statistik , 2023). Garis kemiskinan merupakan rumah tangga

yang mengonsumsi pangan kurang dari nilai tukar beras 240 kg beras setahun per orangnya di pedesaan dan 360 kg di perkotaan. Dan dalam perkembangan selanjutnya ketentuan garis kemiskinan berubah menjadi lebih rinci yaitu di bawah 240, 240-320, 230-480 dan lebih dari 480 kg ekuivalen beras. Klasifikasi ini nampaknya mampu mengelompokkan penduduk secara lebih rinci yaitu, kelompok paling rendah disebut sangat miskin, selanjutnya miskin, hampir berkecukupan dan terakhir berkecukupan (Menurut Sajogyo, 1977).

Adapun menurut UNDP dalam (Cahyat, 2004), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukan penilaian tidak adanya partisipan dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan mempunyai 4 bentuk. Berikut adalah 4 bentuk kemiskinan tersebut yaitu (Suryawati, 2004):

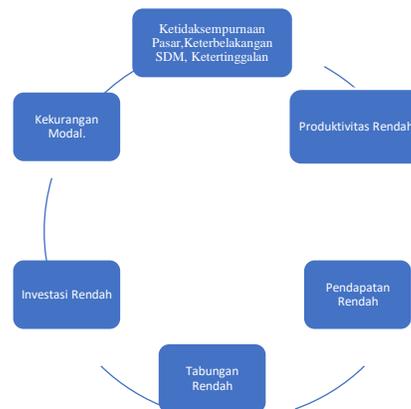
1. Kemiskinan Absolut adalah kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan juga diartikan sebagai sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau

mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan Relatif yaitu diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan setandar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh prohran-program pembanguan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.
3. Kemiskinan Kurtural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan sesseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebijakan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat , kurang kreatif, danrelatif pula bergantung pada pihak lain.
4. Kemiskinan Struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan ini juga terkadang memilikiunsur diskriminatif.

Menurut teori Nurkse (dalam Kunconro 1997:107), kemiskinan berasal dari teori lingkaran setan kemiskinan. adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal,

dan keterbelakangan sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan ikut rendah, rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang diterima rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun. Jika jika pendapatan terus menurun maka dapat mengakibatkan kemiskinan, karena modal untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal. Berikut Gambar 2.1.1 menunjukkan lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragner Nurkse.



Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan

2.1.2 Faktor kemiskinan

Menurut Sharp dalam (Kuncoro, 2010), terdapat tiga faktor yang menyebabkan kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya adanya ketidak samaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat

perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Adelman dan Morris dalam Arsyad (1999) mengemukakan faktor-faktor penyebab kemiskinan antara lain :

1. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyebabkan turunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional oleh pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidak merataan pembangunan atau pertumbuhan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dan proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan dari tambahan modal lebih besar dari pada presentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga angka pengangguran pun bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan pada harga-harga barang hasil industri, guna melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.

7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat adanya ketidak elastisan permintaan terhadap barang ekspor NSB.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri, rumah tangga, dan lain-lain.

2.1.3 Ciri-ciri Kemiskinan

Menurut Todaro (2011), masyarakat dikatakan miskin apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perbedaan drajat ketergantungan didalam kekuatan ekonomi dan politik negara.
2. Perbedaan struktur industri.
3. Perbedaan geografis, dimana jumlah penduduk dan tingkat pendapatan yang dimiliki berbeda-beda.
4. Perbedaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang rendah.
5. Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negara.

Menurut Aziz dan Hartomo (1997), seseorang dikatakan hidup dibawah garis kemiskinan ketika memiliki ciri-ciri berikut:

1. Ketika keadaan seseorang tidak memiliki sendiri untuk faktor produksi yang dihasilkan, contohnya kurangnya keterampilan yang dimiliki serta relatif kecilnya modal yang dimiliki, dan lahan tanah yang dimilikinya tidak cukup. Kurangnya pendapatan atau masih rendahnya pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup umumnya karena sangat sedikitnya faktor produksi yang dimilikinya.
2. Umumnya mereka yang dikatakan miskin karena kemampuan yang tidak dimilikinya di dalam mendapatkan aset-aset melalui kemampuannya sendiri tanpa orang lain. Hal tersebut terjadi karena pendapatan yang mereka miliki sangatlah rendah sehingga tidak mampu untuk mendapatkan modal atau lahan tanah didalam usahanya. Disisi lain kondisi yang tidak mampu dan tidak mendukung mengenai syarat yang diperlukan untuk mengambil kredit perbankan, yang terkadang bunganya tinggi yang biasanya diberikan menjadi masalah ketidak sanggupannya untuk membayarnya serta syarat yang diberikan relatif berat.
3. Masalah mengenai pendidikan, masih banyak diantara mereka yang tingkat pendidikannya sangat rendah, bahkan untuk sekedar lulus sekolah dasar pun tidak tercapai, yang biasanya hal ini diakibatkan karena biaya yang tidak cukup untuk mengenyam bangku pendidikan, bahkan banyak diantara mereka yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dibandingkan untuk belajar, padahal usia mereka merupakan usia yang belum termasuk angkatan kerja. Sehingga banyak dari anak-anak

golongan miskin yang bahkan juga lebih memilih untuk bekerja mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari pada mengenyam bangku sekolah dan mengasah keterampilan.

4. Mereka yang tergolong kedalam masyarakat yang miskin kebanyakan memiliki pekerjaan yang kasar, pekerjaan yang hanya bisa dilakukan ketika musiman saja seperti pekerja buruh petani, sehingga dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut mereka mendapatkan penghasilan yang kurang terjamin. Selain itu juga karena dari golongan mereka tidak mempunyai lahan atau tanah sendiri yang bisa dimanfaatkan untuk sumber pencaharian hidupnya.
5. Mereka yang tergolong kedalam masyarakat yang miskin yang kemudian tinggal di daerah perkotaan namun sulit untuk mencari pekerjaan, karena kurangnya keterampilan yang dimilikinya dan masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya.

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada 14 karakter untuk menentukan suatu keluarga atau rumah tangga itu miskin yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m^2 per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu/ kayu murah.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah; petani dengan luas lahan 500m², buruh tani,nelayan,buruh bangunan,buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.00,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas,ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

2.1.4 Ukuran Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Maka penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Definisi garis kemiskinan sebagai pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Garis Kemiskinan (GA) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Dan paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non makanan yaitu berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 di pedesaan (BPS Garis Kemiskinan). Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berikut adalah rumus perhitungan Garis Kemiskinan (GA):

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

BPS menggunakan tiga indikator dasar kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, yang pertama *Head Count Index* (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Kedua indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Yang dimana semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Ketiga indeks keparahan kemiskinan (*Proverty Severity Index-p2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Yang dimana semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi juga ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

2.2 Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam

satuan uang. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai di dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara dimasa depan atau masa yang akan datang. Secara kuantitatif, tingkat kehidupan dan kemajuan suatu negara ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk dalam suatu negara, konsep ini biasanya dikenal dengan sebutan pendapatan per kapita. Pendapatan Nasional bisa berarti Produk Domestik Bruto atau PDB (*Gross Domestic Product atau GDP*), Produk Nasional Bruto atau PNB (*Gross National Product atau GNP*), Pendapatan Nasional Neto atau NNP (*Net National Income atau NNI*). Konsep Produk Domestik Bruto (PDB) adalah konsep paling penting dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya.

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara. PDB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku pada setiap tahunnya. Sedangkan PDB atas dasar konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku sebagai dasar pada satu tahun tertentu. PDB dan PNB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstannya digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun.

Menurut Sukirno (2013:35), Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik

warga negara dan negara asing. PDB juga dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam negara dalam satu tahun tertentu. Menurut Menkiw (2007:17), PDB adalah jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur nilai total barang dan jasa suatu negara tanpa membedakan kewarganegaraan. Ada dua cara dalam melihat PDB, yang pertama dengan melihat PDB sebagai pendapatan total dari setiap orang didalam perekonomian. Kedua cara lain untuk melihat PDB yaitu sebagai pengeluaran total atas output barang dan jasa perekonomian. Dari dua sudut pandang tersebut, sudah jelas bahwa PDB merupakan cerminan dari kinerja ekonomi. Dengan demikian, perekonomian dengan output barang dan jasa yang besar bisa secara baik memenuhi permintaan rumah tangga, perusahaan dan pemerintahan.

PDB pada dasarnya digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu negara dalam satu periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku menjelaskan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahunnya, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahunnya (BPS 2023).

2.2.2 Metode Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)

Salah satu dari kegunaan penting dari pendapatan nasional yaitu untuk mengetahui tingkat output atau PDB di suatu negara dari setiap tahunnya. Terdapat tiga metode untuk menghitung angka pendapatan nasional (PDB) berdasarkan teori ekonomi yaitu sebagai berikut (Arsyad 1999):

1. Metode Produksi

Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Sektor-sektor produktif dibagi menjadi sebelas setor yaitu:

- a. Pertanian
- b. Industri Pengolahan Pertambangan dan Galian
- c. Listrik
- d. Air dan Gas
- e. Bangunan
- f. Pengangkutan dan Komunikasi
- g. Perdagangan
- h. Bank dan Lembaga Keuangan
- i. Sewa Rumah
- j. Pertahanan
- k. Jasa-Jasa lainnya

Jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan selama satu tahun fiskal disebut Produk Domestik Bruto (PDB).

Teknis perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi ini dengan cara menjumlahkan nilai yang diciptakan. Cara ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perhitungan berganda. Oleh karena itu metode produksi ini juga dikenal dengan metode nilai tambah.

2. Metode Pendapatan

Pendapatan nasional menurut metode pendapatan dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga dan wiraswasta (*entrepreneur*) yang digunakan diberi balas jasa yang masing-masing bernama sewa, bunga upah dan gaji, dan laba. Faktor-faktor produksi tersebut dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat, maka balas jasanya kembali ke masyarakat sebagai pendapatan nasional.

3. Metode Pengeluaran

Perhitungan pendapatan nasional dengan cara ini adalah dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari lapisan masyarakat. Pendapatan yang diterima dari semua lapisan masyarakat akan dibelanjakan pada berbagai barang dan jasa atau ditabungkan. Dalam metode ini pengeluaran di bagi empat yaitu:

- a. Pengeluaran konsumsi perorangan dan rumah tangga (*personal consumption expenditure*) yang terdiri dari: pengeluaran untuk barang-barang yang tahan lama (*durable goods*) dan yang tidak tahan lama. Pengeluaran ini bisa disingkat **C**.
- b. Pengeluaran konsumsi pemerintah (*government expenditure*) yang disingkat dengan **G**.
- c. Investasi domestik bruto yang terdiri dari: bangunan-bangunan baru, alat-alat produksi yang tahan lama, dan persediaan barang-barang oleh perusahaan-perusahaan. Investasi disingkat dengan **I**.
- d. Ekspor (**X**) dikurangi impor (**M**)

Menurut pendapatan pengeluaran, PDB (disingkat dengan **Y**) adalah jumlah dari semua komponen dari permintaan akhir, adapun perhitungannya sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Satuan ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan ataupun perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangan terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya (Arsyad, 1999).

2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara (daerah). Menurut Todaro (2006), Pendapatan per kapita merupakan ukuran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah akibat adanya proses produksi, dengan pendapatan per kapita yang tinggi, masyarakat akan mampu mengeluarkan konsumsinya lebih banyak untuk pendidikan.

Menurut Sukirno (2004), Pendapatan per kapita pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita dihitung dengan berdasarkan pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai ukuran kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara maupun suatu daerah.

Berikut ini adalah penjelasan tiap-tiap manfaat pendapatan per kapita :

1. Indikator kesejahteraan negara merupakan ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu negara. Ini disebabkan karena pendapatan per kapita telah mencakup jumlah penduduk sehingga secara langsung dapat menunjukkan tingkat kemakmuran.
2. Standar pertumbuhan kemakmuran negara. Pendapatan per kapita merupakan standar umum untuk membandingkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara dari tahun ketahun.

3. Secara pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi. Pendapatan per kapita dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi karena pemerintah dapat memantau pertumbuhan ekonomi yang ada dalam masyarakat.
4. Perbandingan tingkat kemakmuran antar negara. Pendapatan per kapita juga umumnya digunakan sebagai perbandingan tingkat kemakmuran antar negara yang satu dengan yang lain. Dengan menetapkan standar per kapita, maka negara-negara di dunia dapat dikelompokkan kedalam negara berpendapatan rendah, menengah, atau tinggi.

Menurut Untoro (2010) PDRB per kapita menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu negara. Pendapatan per kapita menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu negara. Variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah penduduk. Secara matematis, berikut rumus perhitungan pendapatan per kapita:

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{\text{Produk Domestik Regional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik itu atas dasar harga yang berlaku atau atas harga konstan. PDRB juga di definisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha

dalah satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah.

Menurut Widodo (2006) indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di seluruh daerah.

Angka total pendapatan atau produk nasional bruto (GNP – *Gross National Product*) per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara. Konsep GNP itu sendiri merupakan indikator atas besar kecilnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Menurut Todaro & Smith (2012), GNP adalah nilai moneter (dalam satuan uang) atas segenap kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh penduduk suatu negara, tanpa harus dikurangi oleh depresiasi atau stok modal.

2.3 Pengangguran

Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran merupakan masalah dalam perekonomian, karena

dengan adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang sehingga menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran adalah keadaan dimana orang ingin bekerja namun tidak mendapatkan pekerjaan.

Menurut Menkiw (2006:154), mendefinisikan pengangguran sebagai masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat.

Menurut Simanjuntak (2003), pengangguran yaitu orang berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Usia kerja adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tapi diatas usia anak-anak (relatif diatas usia 6-18 tahun, yaitu dimasa pendidikan dari SD-tamat SMA). Sedangkan diatas usia 18 namun masih sekolah dapat dikategorikan pengangguran.

Pengangguran menurut BPS dalam indikator ketenaga kerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

2.3.1 Jenis-Jenis Pengangguran

Sukirno (2006) menyebutkan bahwa ada dua hal yang membedakan jenis-jenis pengangguran yaitu berdasarkan penyebab dan ciri-cirinya:

Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

1. Pengangguran Friksional

Apabila dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran sebanyak tiga persen dari seluruh jumlah tenaga kerja maka ekonomi tersebut sudah dipandang sebagai pencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau friksional. Tidak mempunyai pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tapi sedang mencari pekerjaan yang menurut mereka lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran akan rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, maka dari itu pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi, ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan kemampuannya. Dalam proses pencarian kerja ini, sementara para pekerja baru tersebut termasuk sebagai pengangguran. Mereka ini lah yang tergolong sebagai pengangguran friksional.

2. Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan tepat. Adakalanya dimana permintaan agregat lebih tinggi, ini akan mendorong pada pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja digunakan maka pengangguran semakin berkurang. Akan tetapi pada waktu lainnya permintaan agregat menurun. Penurunan permintaan agregat ini akan berakibat pada perusahaan yang kemudian akan mengurangi jumlah pekerja atau bahkan menutup perusahaannya, akibatnya pengangguran bertambah. Pengangguran ini lah yang disebut dengan pengangguran siklikal.

3. Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan di dalam suatu perekonomian akan terus berkembang maju, akan tetapi sebagiannya mengalami kemunduran. Kemerosotan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya barang baru yang lebih baik, majunya teknologi, dan ekspor produksi industri menurun karena persaingan yang lebih serius di negara-negara lain. Kemerosotan ini akan berdampak pada kegiatan produksi di industri, sebagian pekerja akan terpaksa diberhentikan, dan berakibat pada peningkatan pengangguran. Pengangguran ini yang disebut pengangguran struktural.

4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini ditimbulkan oleh adanya pengganti tenaga manusia dengan mesin dan bahan kimia. Racun ilalang dan rumput misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga manusia dalam membersihkan perkebunan sawah san lahan pertanian. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja

seperti memotong rumput, membersihkan kawasan dan memungut hasil, sedangkan di pabrik-pabrik adakalanya pekerjaan manusia digantikan oleh robot. Pengangguran ini yang disebut oleh penggunaan mesin kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

Jenis pengangguran berdasarkan cirinya:

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pada pertumbuhan tenaga kerja. Akibatnya semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Akibatnya dari keadaan ini dalam jangka panjang mereka tidak melakukan pekerjaan, jadi menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran ini juga akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dan dari peningkatan kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja atau akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.

2. Pengangguran Tersembunyi

Kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyaknya faktor. Faktor yang dipertimbangkan antara lain yaitu besar kecilnya suatu perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang dicapai. Dibanyak negara berkembang seringkali

didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang dibutuhkan supaya dapat menjalankan kegiatan secara efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan termasuk dalam golongan pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini biasanya terjadi disektor pertanian atau jasa.

3. Pengangguran Bermusim

Pengangguran ini biasanya terdapat pada sektor pertanian dan perikanan. Contohnya pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para pesawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada umumnya para pesawah tidak begitu aktif diantara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa diatas para penyadap karet, nelayan, dan pesawah tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

4. Setengah Menganggur

Migrasi dari desa ke kota biasanya sangat padat pada negara-negara berkembang. Akibatnya tidak semua orang yang bermigrasi ke kota dapat dengan mudah memperoleh pekerjaan. Sebagiannya terpaksa menganggur sepenuh waktu. Selain itu ada yang tidak menganggur, namun tidak pula

bekerja dengan sepenuh waktu karena dana jam kerja mereka jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin bekerja hanya dua hari dalam seminggu. Pekerja yang mempunyai masa kerja ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pengangguran

Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran menurut Sukirno (2006):

1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Hal ini terjadi saat jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia.
2. Struktur lapangan kerja tidak seimbang.
3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik dan penyediaan tenaga kerja terdidik tidak seimbang.
4. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.
5. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.

2.3.3 Dampak Dari Pengangguran

Adapun dua dampak dari pengangguran yaitu:

Dampak bagi perekonomian negara:

1. Rendahnya pendapatan per kapita

2. Penurunan pendapatan pemerintah yang bersumber dari sektor pajak
3. Meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk biaya sosial
4. Bertambahnya utang negara
5. Daya beli menurun sehingga menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun

Dampak bagi masyarakat:

1. Meningkatnya kemiskinan
2. Memicu tindakan kriminal atau kejahatan
3. Munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial
4. Menjadi beban psikologis bagi pengangguran itu sendiri atau keluarganya
5. Keterampilan menurun

2.4 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan atau kelompok target. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjai garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan atau organisasi) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl Friedrich mengemukakan bahwa pengertian kebijakan itu merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh kelompok, seseorang, atau juga pemerintah didalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan juga kesempatan-kesempatan terhadap suatu kebijakan yang di usulkan untuk bisa menggunakan serta juga mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau juga merealisasikan suatu sasaran atau juga maksud tertentu.

Keijakan digunakan pemerintah untuk menyudahi permasalahan atau problematika daerah di suatu pemerintahan. Pada kenyataannya kebjakan dapat banyak menolong pada pelaksana pada tingkat pemerintahan maupun para politisi untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah publik. Kebijakan juga memiliki arti suatu bentuk campur tangan yang dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan kelompo-kelompok kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut *David Easton* (1969), kebijakan publik yaitu penentuan akan nilai-nilai kekuasaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang dimana kehadirannya mengikat dan hanya pemerintah yang dapat melakukan tindakan terhadap masyarakat. Tindakan tersebut merupakan perwujudan dari yang sudah dipilih oleh pemerintah sebagai hasil dari alokasi nilai terhadap masyarakat.

Menurut *Thomas R. Dye* (1981), mengungkapkan bahwa kebijakan publik ialah hal-hal yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sessuatu yang tidak dilakukan pemerintah sisamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah

menghadapi suatu masalah publik. Contohnya, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan yang rusak dan mereka tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik yang diungkapkan oleh *Thomas R. Dey* ini mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta, dan kebijakan publik juga menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Menurut *N. Dunn*, berpendapat bahwa kebijakan publik adalah sebuah daftar tindakan yang saling terkait dan disusun oleh pejabat pemerintah atau instansi pemerintah di antaranya dalam bidang kesehatan, pertahanan, kesejahteraan, pendidikan, pembangunan perkotaan dan pengendalian kriminalitas.

Menurut *Irfan Ismail*, dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan publik* beliau mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu rangkaian tindakan yang ditetapkan dan dijalankan ataupun tidak dijalankan oleh pemerintah yang bertujuan atau memiliki orientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut *Leo Agustino*, kebijakan publik yaitu suatu rangkaian aktifitas atau tindakan yang diajukan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah disebuah lingkungan tertentu. Yang di dalamnya ada kesulitan-kesulitan serta peluang-peluang dimana kebijakan itu diajukan. Sehingga memberikan manfaat untuk mengatasi dan mencapai tujuan yang diharapkan.

2.4.1 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Wahad (2002), ciri-ciri kebijakan publik yaitu ciri-ciri khusus yang terdapat pada kebijakan publik yang bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh mereka yang memiliki wewenang dalam sistem politik. Oleh karena itu ciri-ciri kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti seperti kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
- d. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dalam campur tangan pemerintah justru diperlakukan.

2.4.2 Jenis Kebijakan Publik

James Anderston sebagaimana dikutip Suharno (2010), menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulator versus kebijakan radistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan radistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat merinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori yaitu:

a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Tuntutan kebijakan atau policy demands yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah itu sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan tersebut bisa bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi didalam masyarakat.

b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Keputusan kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Pernyataan kebijakan yaitu pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan pengadilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

d. Keluaran kebijakan (*policy output*)

Keluaran kebijakan merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Singkatnya keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Hasil akhir adalah akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang atau masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

2.5 Program Kartu Indonesia Pintar

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan implementasi dari Program Indonesia Pintar (PIP). Kartu Indonesia Pintar yang menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo ini diresmikan pada 3 November 2014. KIP diterbitkan oleh TNP2K (Team Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang bekerjasama dengan

kementrian sosial. Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan pendidikan tunai kepada anak usia sekolah (6-12 tahun) dan berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang juga merupakan bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Melalui Program Indonesia Pintar pemerintah memperluas cakupan pemberian bantuan tunai pendidikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan mendorong keberlanjutan pendidikan dari anak kalangan kurang mampu. Sasaran utama penerima Kartu Indonesia Pintar ini yaitu anak yang orang tuanya memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya. KIP diberikan sebagai penanda untuk menjamin dan memastikan seluruh anak yang berusia sekolah dari kalangan tidak mampu terdaftar sebagai penerima bantuan baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga SMA/SMK/MA) atau melalui jalur pendidikan informal dan non formal.

Tujuan dari pemberian bantuan pendidikan ini adalah untuk menjamin anak-anak yang berada di usia sekolah menempuh pendidikan minimal hingga jenjang pendidikan menengah. KIP juga mencakup anak-anak yang berada diluar lingkungan sekolah, seperti anak panti asuhan, anak jalanan, dan anak difable. Dan KIP juga berlaku untuk anak di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pondok pesantren, dan anak di Balai Latihan Kerja (BLK).

2.5.1 Tujuan Kartu Indonesia Pintar

Program Kartu Indonesia Pintar ini ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi para siswa untuk bersekolah, sehingga membuat anak-anak tidak lagi berfikir untuk berhenti sekolah. Selain menghindari anak-anak putus sekolah, program KIP juga agar bisa menarik kembali siswa yang telah putus sekolah agar bisa kembali bersekolah. Bukan hanya tentang soal biaya administrasi sekolah saja, program ini juga bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Program KIP juga sangat mendukung untuk mewujudkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal/wajib belajar 12 tahun.

2.5.2 Manfaat Kartu Indonesia Pintar

Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-12 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) bila terdaftar di sekolah, madrasah, pondok pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus.
2. Untuk tahap awal di 2014, Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah dicetak untuk sekitar 160 ribu siswa di sekolah umum dan juga madrasah di 19

Kabupaten/Kota. Untuk 2015, diharapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat diberikan kepada 20,3 juta anak usia sekolah baik dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang ditetapkan (seperti anak dari keluarga peserta PKH).

3. Kartu Indonesia Pintar juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada disekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di panti asuhan/sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difable. KIP juga berlaku di pondok pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat dan lembaga kursus dan pelatihan yang ditentukan pemerintah.
4. Kartu Indonesia Pintar (KIP) mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar disatuan pendidikan untuk kembali bersekolah.

2.5.3 Sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar

Sasaran Kartu Indonesia Pintar adalah anak-anak yang berusia 6 sampai 21 tahun yang merupakan :

1. Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) pemegang Kartu Pelindungan Sosial (KPS).
2. Anak dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP yang belum menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM).

3. Anak/siswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (KKS) non KPS.
4. Anak/siswa yang berstatus yatim piatu dari panti sosial/panti asuhan.
5. Anak/siswa yang terkena dampak bencana alam.
6. Anak/siswa usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah yang diharapkan kembali bersekolah.
7. Anak/siswa dari keluarga miskin yang terancam putus sekolah atau anak/siswa dengan pertimbangan khusus lainnya seperti kelainan fisik, korban musibah, dan orang tua PHK, didaerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lapas, memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal dalam satu rumah.
8. Peserta pada lembaga khusus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

2.6 Program Kartu Indonesia Sehat

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) Merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla yang tercantum dalam Nawacita ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS. Penggantian kartu BPJS kesehatan menjadi KIS yaitu dimulai pada 1 Maret 2015. Para pihak berwenang menjelaskan bahwa KIS adalah program perluasan keanggotaan JKN untuk masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) yang belum terdaftar sebagai peserta JKN penerima

Bantuan Iuran (PBI). KIS yaitu program yang dibuat dalam bentuk sebuah kartu dengan fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Pemegang KIS dapat menggunakannya disetiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini juga merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dibidang pelayanan kesehatan. KIS memberikan tambahan manfaat, layanan preventif, promotif dan deteksi dini yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi (Pratomo,2015:13).

2.6.1 Manfaat Kartu Indonesia Sehat

Ada beberapa Manfaat bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai berikut:

1. Pendaftaran tidak dikenai biaya apapun alias gratis karena khusus bagi keluarga miskin.
2. Pengang KIS tidak perlu membayar biaya bulanan.
3. Pemegang KIS bisa mendapatkan layanan kesehatan dimanapun selama berada di wilayah Indonesia.
4. Pemegang KIS bisa mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit tanpa harus membuat surat rujukan dari faskes pertama seperti pengguna BPJS.
5. Pelayanan kesehatan pengguna KIS berupa pencegahan maupun pengobatan.

2.6.2 Sasaran Penerima Kartu Indonesia Sehat

KIS ditunjukkan untuk masyarakat yang tergolong kurang mampu, penerima KIS tidak diwajibkan membayar iuran seperti halnya peserta BPJS. Selain itu juga kepemilikan KIS terbatas pada masyarakat golongan kurang mampu.

Sasaran dari KIS ini adalah untuk meningkatkan drajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesesehatan. Sasaran nya sesuai dengan sasaran pokok RPJMD 2015-2019, yaitu:

1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak.
2. Meningkatkan pengendalian penyakit.
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.
4. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan.
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin.
6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

2.6.3 Syarat pendaftaran Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Adapun beberapa syarat pendaftaran KIS bagi keluarga ataupun masyarakat kurang mampu, diantaranya yaitu:

1. Keluarga bukan pekerja penerima upah atau (BPPU).

2. Seluruh anggota keluarga diwajibkan untuk mendaftar sesuai data di Kartu Keluarga.
3. Daftar di kantor BPJS terdekat.
4. Dokumen yang dibutuhkan diantaranya adalah KTP, KK, Surat Keterangan Domisili, pas foto warna 3X4 masing-masing anggota satu lembar.
5. Menandatangani surat pernyataan.
6. Anak angkat juga bisa didaftarkan BPJS, dengan menyertakan bukti yang sah dari pengadilan.
7. Pendaftaran dapat diwakilkan, jika calon peserta BPJS tidak bisa melakukan pendaftaran sendiri. Dengan alasan, perwakilan harus dibekali surat kuasa bermatrai 6000.

2.7 Program Kartu Keluarga Sejahtera

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan kartu yang dikeluarkan pemerintah yang menggantikan Kartu Pelindungan Sosial (KPS) sebagai simbol keluarga kurang mampu. Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat ini untuk membangun keluarga produktif merupakan program unggulan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, menandai era baru upaya peningkatan kesejahteraan kelompok kurang mampu. KKS menjadi salahsatu program perlindungan sosial dari pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Dengan pelaksanaan program ini pemerintah dapat mampu meningkatkan harkat dan

martabat keluarga kurang mampu melalui perlindungan dan pemberdayaan serta tidak sekedar diberikan *charity*.

2.7.1 Manfaat Kartu Keluarga Sejahtera

Beriku adalah beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari Kartu Keluarga Sejahtera:

1. Kartu Keluarga Sejahtera bisa menyimpan kuota bantuan yang didapatkan dari pemerintah.
2. Bisa digunakan untuk mengambil bantuan beras dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
3. Bisa digunakan untuk uang elektronik, kartu debit atau ATM yang bisa digunakan untuk transaksi perbankan seperti menarik saldo, beli pulsa, membayar tagihan, dan sejenisnya.
4. Selain itu kartu ini juga bisa digunakan untuk menabung, layanan seperti kart ATM pada biasanya.

2.7.2 Kriteria Penerima Kartu Keluarga Sejahtera

Tentunya tidak semua orang bisa menerima atau membuat Kartu Keluarga Sejahtera. Karena terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi yaitu:

1. Berusia minimal 22 tahun atau lebih.

2. Para penyandang disabilitas yang tinggal di panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
3. Lansia yang tinggal di panti atau LKS.
4. Pengemis dan gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal, memiliki tempat tinggal tidak layak huni, atau yang tinggal di panti asuhan.
5. Korban penyalahgunaan narkoba yang tinggal di panti atau LKS.
6. Mantan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

2.7.3 Syarat Membuat Kartu Keluarga Sejahtera

Ada beberapa cara untuk membuat Kartu Keluarga Sejahtera yaitu:

1. Laukan pendaftaran melalui RT/RW atau kantor kelurahan.
2. Selanjutnya akan mendapatkan surat pemberitahuan tentang cara dan syarat pendaftaran .
3. Menyiapkan dokumen sesuai syarat-syarat tertentu.
4. Proses data akan dilakukan oleh HIMBAR, kantor kelurahan, serta kantor kabupaten.
5. Lalu menunggu untuk mendapatkan hasil verifikasi data.
6. Selanjutnya KPM membuat rekening Bank untuk KKS.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Noor Zuhdiyaty, David Kaluge (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provindi)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama kurun waktu lima tahunan 2011 -2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara IPM dengan kemiskinan, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi dan TPT tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan	Varabel Dependen: Kemiskinan	Terdapat perbedaan variabel independen
2.	Paulo Grasioano Izaak	Pengaruh Anggaran	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh	Kebijakan di bidang Kesehatan yaitu Kartu	Variabel Dependen: Tingkat	Teerdapat perbedaan variabel

NO	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kawatu, Daisy S.M. Engka, Krest D. Tolosang (2018)	Kesehatan, Pendidikan Dan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Minahasa (Studi Pada Kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan)	anggaran di bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial, terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa serta untuk mengetahui pengaruh anggaran di bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sosial secara bersamaan, terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa	Indonesia Sehat (KIS) tidak memberikan pengaruh dalam penurunan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa. Kebijakan di bidang Pendidikan memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa, atau dengan kata lain Kebijakan dibidang pendidikan yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) memberikan pengaruh dalam penurunan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa. Kebijakan di bidang Sosial yaitu Bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) tidak memberikan pengaruh	Kemiskinan Independen: Anggaran di bidang kesehatan (KIS), anggaran dibidag pendidikan (KIP)	independen lainnya seperti pendapatan per kapita dan pengangguran terdidik serta perbedaan lokasi

NO	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				dalam penurunan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa. Kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan di bidang Kesehatan, Pendidikan dan Sosial tidak memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat penurunan kemiskinan di Kabupaten Minahasa		
3.	Marhein Maliangga, Een N. Walewangko, Albert T. Londa (2019)	Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dan Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Kebijakan pemerintah kartu Indonesia pintar (KIP) dan kartu Indonesia Sehat (KIS) terhadap konsumsi rumah tangga miskin di kecamatan dumoga timur kabupaten bolaang mongondow	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program kartu Indonesia pintar (D1) dan program kartu Indonesia sehat (D2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga miskin, sehingga dapat	Variabel Dependen: Kemiskinan Independen: Kartu Indonesia Pintar (KIP),	Terdapat perbedaan variabel lainnya seperti pendapatan per kapita dan pengangguran terdidik dan

NO	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow		disimpulkan bahwa program KIP dan KIS memiliki percepatan penurunan penanggulangan kemiskinan	Kartu Indonesia Sehat (KIS)	ada perbedaan lokasi
4.	Lily Leonita, Rini Kurnia Sari (2019)	Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia	Bertujuan memverifikasi apakah produk domestik regional bruto, tingkat pengangguran, dan IPM memberikan kontribusi pada kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia selama periode 2011-2017	Hasil penelitian menunjukkan laju PDRB, IPM, dan pengangguran secara simultan memberikan pengaruh pada kemiskinan. Pengujian secara parsial menunjukkan tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh laju PDRB dan	Variabel Dependen: Kemiskinan Independen: PDRB Per kapita	Terdapat perbedaan variabel lainnya seperti pengangguran terdidik, KIP, KIS, dan KKS serta perbedaan

NO	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				pengangguran . Sedangkan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.		lokasi
5.	Fanny Cantika Roselina, Emi Maimunah (2022)	Analisa pengaruh PDRB Per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2021.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel PDRB Perkapita dan IPM masing-masing mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variable TPT mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode Tahun 2017-2021.	Variabel Dependen: Kemiskinan Variabel Independen: PDRB Per kapita dan pengangguran terbuka	Terdapat perbedaan variabel lainnya seperti pendapatan pengangguran terdidik dan ada perbedaan lokasi
6	A. Mahendra	Analisis Pengaruh	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Yang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yaitu	Terdapat	Terdapat

NO	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	(2019)	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara	Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara 2003-2014	pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, dan pengangguran mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara	persamaan dala variable dependen yaitu kemiskinan dan variable independent yaitu pendapatan perkapita dan pengangguran	perbedaan lokasi penelitian serta terdapat perbedaan pada variable independent yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi
7	Dwi Yunianto (2020)	<i>Analysis of the effect of poor population growth</i>	Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, dan jumlah pengangguran terhadap pertumbuhan penduduk miskin kota Samarinda	Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan perkapita tidak berpengaruh tetapi signifikan terhadap pertumbuhan penduduk miskin, tingkat pendidikan	Terdapat persamaan dala variabel dependen yaitu kemiskinan	Terdapat perbedaan lokasi penelitian serta variable dependen dimana

NO	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				(angka melek huruf) tidak berpengaruh namun signifikan terhadap pertumbuhan penduduk miskin, pengangguran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan penduduk miskin.	dan variabel independent yaitu pendapatan perkapita dan pengangguran	peneliti sebelumnya juga menggunakan variabel Pendidikan (angka melek huruf)
8	Sulaeman Masnan Dan Ahmad Nashir (2020)	Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah program kartu keluarga sejahtera memiliki dampak baik dalam penganggulangan kemiskinan	Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai telah berjalan dengan sesuai prosedur yang ditetapkan serta Program Kartu Keluarga Sejahtera bagi masyarakat miskin di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten	Terdapat persamaan pada topik atau tobjek yang diteliti yaitu program kartu keluarga sejahtera (KKS)	Terdapar perbedaan lokasi penelitian

NO	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				Sinjai sangat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, guna meningkatkan kualitas gizi utama masyarakat agar terhindar dari malnutrisi.		

2.9 Kerangka Pemikiran

Kemiskinan adalah situasi dimana suatu kelompok atau perorangan terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-harinya seperti sandang, pangan, ataupun papan. Dampaknya dari kemiskinan ini dapat menyebabkan kualitas sumber daya manusia nya mengalami penurunan sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperoleh rendah. Dikarenakan pendapatan yang rendah itu mereka tidak mampu untuk menerima gizi makanan yang kurang baik, pendidikan yang tidak mencukupi, dan kesehatan juga terdampak dari fenomena kemiskinan ini. Kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidak sempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas akan mengakibatkan pendapatan juga ikut rendah, rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang di terima rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun (Teori Nurkse (dalam Kuncoro 1997:107)).

Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dan juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara (Lincoln Arsyad (1999). Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah (Thamrin, 2000). Berarti semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan demikian

jumlah penduduk miskin akan berkurang. Menurut penelitian Deni Tisna Amijaya (2008) mengatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

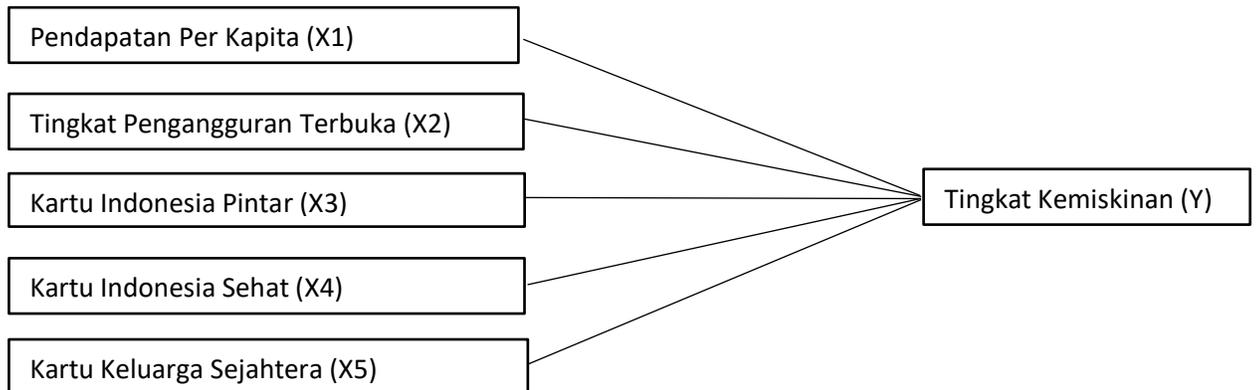
Menurut Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Menurut Lincoln Arsyad (1997) yang menyatakan bahwa salah jika beranggapan setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Hal ini karena kadangkala ada pekerjaan diparkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demi kien karena mereka mempunyai sumber lain yang membantu masalah keuangan mereka.

Kemiskinan adalah situasi dimana suatu kelompok atau perorangan terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-harinya seperti sandang, pangan, ataupun papan. Dampaknya dari kemiskinan ini dapat menyebabkan kualitas sumber daya manusia nya mengalami penurunan sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperoleh rendah. Dikarenakan pendapatan yang rendah itu mereka tidak mampu untuk menerima gizi makanan yang kurang baik, pendidikan yang tidak mencukupi, dan kesehatan juga terdampak dari fenomena kemiskinan ini.

Ada banyak cara untuk meminimalisir tingkat kemiskinan seperti membangun pendidikan yang bermutu yang dapat diakses oleh semua kalangan termasuk mereka yang ekonominya menengah kebawah, meningkatkan pelayanan kesehatan diberbagai daerah, dan melaakukan pembangunan pembangunann infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program-program pengentasan kemiskinan seperti program sosial untuk rakyat yang telah diberlakukan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Dan Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Tujuan utama dari pemberlakuan program-program ini adalah untuk mempercepat penanggulangan masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah besar bagi Indonesia terutama di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan-kebijakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, tapi kenyataanya angka kemiskinan masih terus bertambah. Kemiskinan yang terjadi tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh sebab itu penelitian ini akan menjelaskan gambaran kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dan mencari faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut. Variabel bebas yang akan diteliti pengaruhnya yaitu pendapatan per kapita, tingkat pengangguran terbuka, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengacu pada tingkat kemiskinan adapun asumsi dasar variabel ini sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian

2.10 Hipotesis Penelitian

Dari permasalahan dan alur kerangka pemikiran, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Dengan demikian, secara simultan diduga PDRB per kapita, KIP, KIS, KKS, berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2021, sedangkan Tingkat pengangguran terbuka, berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2021.

1. Pendapatan PDRB per kapita diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2021.
2. Tingkat Pengangguran terbuka diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2021.
3. Kartu Indonesia Pintar diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2021.

4. Kartu Indonesia Sehat diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2021.
5. Kartu Keluarga Sejahtera diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2021.